

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Dinas Perikanan

1. Pengertian Peran

Secara teori peran digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi, dimana tiga hal tersebut merupakan kombinasi atau perpaduan dari berbagai teori, orientasi dan disiplin ilmu. Teori peran menjelaskan istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, yang menggambarkan bahwa seorang aktor yang berperan sebagai tokoh tertentu dengan karakter dari tokoh tersebut, maka aktor diharapkan mampu untuk berperilaku atau memerankan sesuai dengan peran atau karakter dari tokoh tertentu tersebut. Analogi dari posisi aktor tersebut adalah posisi seseorang di masyarakat, dimana seorang masyarakat juga harus bisa melaksanakan perannya sesuai dengan posisi, tugas dan fungsinya di masyarakat.¹⁵ Dari paparan teori peran diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran merupakan teori yang membahas mengenai hubungan antara posisi dan perilaku seseorang, dimana posisi yang disandang seseorang akan menimbulkan peran yang harus dilakukan.

Secara pengertian berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan

¹⁵ Sarlito Wirawa Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 215

utama.¹⁶ Lebih luasnya lagi pada ranah ilmu sosial peran memiliki definisi yaitu suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹⁷ Seseorang dapat dikatakan menjalankan perannya apabila melaksanakan hak dan kewajibannya yang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial berhubungan dan berkaitan dengan status sosial lainnya.¹⁸

Berdasarkan paparan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan mampu dilaksanakan oleh seseorang, kelompok, organisasi, lembaga dan sebagainya berdasarkan status atau posisi yang disandangnya untuk bisa memberikan dampak atau pengaruh kepada pihak lain atau lingkungannya dengan berlandaskan hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Dari penjelasan tersebut mengenai peran apabila dihubungkan dengan Dinas Perikanan terhadap kelompok pembudidaya ikan adalah tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan selaku pihak yang mempunyai posisi atau kedudukan sebagai lembaga yang mempunyai tugas salah satunya untuk mengembangkan masyarakat di bidang perikanan sehingga mampu berpengaruh terhadap

¹⁶ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hal. 735

¹⁷ Arif Tetsuya, "Pengertian Peran" dalam <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 1 Juli 2021

¹⁸ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 7

kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok pembudidaya ikan.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu institusi pemerintah yang berjalan dibawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sesuai dengan nama dan Kementerian yang menjadi naungan, institusi ini mempunyai visi dan misi yang merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Visi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan Misi yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia, Melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan Dan Perikanan.
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap Perekonomian Nasional.
- c. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.¹⁹

¹⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, “Visi dan Misi”, dalam <https://kkp.go.id/page/7- visi-dan-misi>, diakses 2 Juli 2021

Adanya Dinas Perikanan dan Kelautan merupakan bentuk implementasi dari amanah Undang-undang No. 7 Tahun 2016 pada Pasal 61 Ayai 1 disebutkan bahwa pemerintah, baik pemerintah ditingkat pusat ataupun pemerintah ditingkat daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk memberikan fasilitas kepada nelayan berupa bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan, baik itu nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, pengarap lahan budidaya, petambak garam kecil, juga termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan dimana nelayan tersebut melakukan proses pengelolaan dan aktivitas pemasaran.²⁰ Dari Undang-undang tersebut tergambar mengenai apa yang menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Kelautan dan Peraikanan. Sebagai kelanjutan pada Pasal 3 disebutkan mengenai tujuan dari pemberdayaan dan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan penambak garam yaitu:

- a) Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perkembangan usaha nelayan
- b) Memberikan kepastian0usaha yang berkelanjutan
- c) Memberi peningkatan terhadap kemampuan dan kapasitas nelayan, Pembudidaya ikandan penambak garam; penguatan kelembagaan dalam proses pengelolaan sumberdaya ikaan dan kelautan guna dapat melaksanakan usaha secara mandiri, produktif, maju modern, berkelanjutan dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Bab VI, Pasal 61

lingkungan

- d) Menumbuhkan serta mengembangkan sistem dan kelembagan pembiayaan guna melayani kebutuhan dana untuk kepentingan usaha nelayan
- e) Melindungi dari resiko bencana alam, iklim yang tidak pasti dan pencemaran
- f) Memberi jaminan keselamatan, keamanan dan bantuan hukum.²¹

3. Birokrasi

a. Pengertian Birokrasi

Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang dibuat atau dirancang guna menangani tugas-tugas administrasi dalam skala yang besar serta mengatur, mengelola atau mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis.²² Dalam kehidupan sehari-hari istilah birokrasi dapat dibedakan dalam beberapa makna, diantaranya :

- 1) Birokrasi sebagai aturan yang dijalankan oleh para pejabat merupakan seperangkat aturan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan tersebut dibuat untuk mempermudah proses pelayanan publik
- 2) Birokrasi sebagai administrasi publik adalah proses pengelolaan sumberdaya publik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Bab 2, Pasal 3

²² Sedarmayanti dan Nita Nurliawati, *Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Palayanan*, Jurnal Ilmu Administrasi, VOL IX, No. 3, Tahun 2012, hal. 343

masyarakat. Birokrasi merupakan unsur pelaksana dari administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional.

- 3) Birokrasi sebagai organisasi. Pada maknaini organisasi yang dimaksud adalah memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal. Organisasi sebagai sistem kerjasama berarti : a) sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan secara baik, dimana masing-masing mengandung wewenang, tugas dan tanggungjawab yang memungkinkan setiap orang dapat bekerjasama secara efektif. b) sistem penugasan pekerjaan kepada orang-orang berdasarkan kekhususan bidang kerja masing-masing. c) sistem yang terencana dari suatu bentuk kerjasama yang memberikan peran tertentu untuk dilaksanakan kepada anggotanya.²³

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan dari pengertian birokrasi yaitu mengenai bagaimana suatu organisasi, institusi atau lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut agar bisa terlaksana secara sistematis, efektif, efisien dan tepatdengan model pengorganisasian serta berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku.

²³ Tri Yuniningsih, *Kajian Birokrasi*, (Semarang: Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UDIP, 2019), hal. 8-9

b. Konsep Kinerja Birokrasi

Dalam konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, telah diatur dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1995 telah memberikan rambu-rambu pelayanan birokrasi publik secara baik. Berbagai prinsip pelayanan seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis dan keadilan yang merata merupakan prinsip-prinsip pelayanan yang harus diakomodasi dalam pemberian pelayanan publik di Indonesia. Birokrasi publik dituntut mampu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada publik maupun kepada investor dari negara lain. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1) Produktivitas

Konsep produktivitas mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Produktivitas disini dipahami sebagai rasio *input* dan *output* dimana pelayanan publik itu harus memiliki hasil yang diharapkan.

2) Kualitas layanan

Kepuasan masyarakat terhadap baik atau buruknya pelayanan menjadi indikator kinerja organisasi publik. Birokrasi yang baik dapat tergambar dari kualitas layanan publik yang baik pula.

3) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang baik, ditunjukkan dengan keselarasan antara program yang dijalankan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebaliknya, responsivitas yang rendah ditunjukkan tidak selarasnya antara program yang dijalankan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4) Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Oleh sebab itu responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

5) Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.²⁴

²⁴ *Ibid.* hal. 99-102

Dari Penjelasan diatas mengenai birokrasi dan konsep kinerjanya apabila dihubungkan dengan Dinas Perikanan dan Kelompok Pembudi daya Ikan adalah mengenai aturan-aturan atau pedoman yang menjadi acuan pada Dinas Perikanan sebagai salah satu institusi pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang agar melaksankannya dapat terorganisir, tepat, efisien, efektif dan sitematis dalam hal ini adalah melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap kelompok pembudidaya ikan.

B. Perkembangan Usaha

1. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha merupakan suatu upaya yang berupa usaha yang sengaja dilakukan untuk suatu usaha itu sendiri yang bertujuan untuk kemajuan usaha dan mencapai pada titik kesuksesan. Upaya atau kiat untuk mengembangkan usaha ini dilakukan oleh usaha yang sudah berproses dan terdapat kemungkinan untuk bisa maju. Perkembangan usaha adalah suatu keadaan terjadinya peningkatan terhadap omset penjualan.²⁵

2. Tahap Perkembangan Usaha

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo, perkembangan usaha dapat dibedakan menjadi empat tahap konseptual, yaitu :

- a. Mengenal peluang potensial

²⁵ Purdi E Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), hal. 121

Untuk bisa mengetahui peluang potensial pelaku usaha harus mampu mengetahui masalah-masalah yang ada di pasar dan mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan solusi-solusi yang tepat. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dijadikan peluang yang potensial yang akan dilakukan.

b. Analisa peluang

Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan melakukan analisa peluang berupa *market research* kepada calon pelanggan potensial. Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap produk, proses dan pelayanannya.

c. Mengorganisasi sumber daya

Tahap ini merupakan tahap yang paling penting karena merupakan kunci keberhasilan suatu usaha untuk dapat menjamin keberlangsungan usahanya. Tahap ini bisa disebut dengan tahap *warming up*.

d. Langkah mobilisasi sumber daya

Langkah mobilisasi sumber daya dan menerima risiko adalah langkah terakhir sebelum ke tahap *start up*. Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

3. Indikator Perkembangan Usaha

Tolokukur seberapa besar keberhasilan dan perkembangan usaha dapat diukur dari peningkatan omset penjualan. Tolokukur perkembangan usaha harus memenuhi syarat yaitu instrumen yang bisa diukur, sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya karena pengukuran instrumen tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan. Dengan kata lain, semakin konkrit tolokukur itu maka semakin mudah pula bagi pihak lain untuk memahami dan membernarkan atas keberhasilann atau perkembangan usaha tersebut.²⁶

Terdapat peneliti (Kim dan Choi 1994, Lee dan Miller 1996, Lou 1999, Miles at all 2000, Hadjimanolis 2000) yang merekomendasikan instrumen sebagai tolokukur perkembangan usaha, diantaranya adalah angka omset penjualan yang mengalami peningkatan, bertumbuhnya atau meningkatnya jumlah tenaga kerja dan meningkatnya konsumen atau pelanggan.²⁷ Sedangkan indikator-indikator perkembangan usaha yang digunakan dalam penelitian ini meliputi produktivitas, peningkatan jumlah tenaga kerja, inovasi usaha, dan peningkatan pendapatan usaha. Penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.

Menurut teori ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan produktivitas

²⁶ Mohammad Sholeh, *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*, (Semarang: UNDIP, 2008), hal. 25

²⁷ Wina Saparingga, *Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Kopo Bandung)*, (Bandung: UNISBA, 2015), hal. 38

ialah perbandingan antara bahan/usaha yang harus dikeluarkan (*cost*) dengan hasil yang diinginkan/harapkan (*revenue*). Pada usaha perikanan atau budidaya, dinyatakan bahwa hasil/output yang diperoleh pelaku budidaya pada saat panen disebut hasil produksi sedangkan biaya yang dikeluarkan disebut biaya produksi.

Sedangkan tahapan yang dilalui untuk menciptakan barang atau jasa disebut proses produksi. Secara artian yang lebih mengarah pada “operasional” yang disebut produksi adalah suatu proses mengubah suatu barang atau jasa yang disebut input/bahan menjadi barang atau jasa yang mampu dimanfaatkan hingga disebut output/hasil.²⁸

Apabila dihubungkan dengan kegiatan budi daya perikanan produktivitas berarti kemampuan atau usaha pembudi daya untuk menghasilkan output dalam hal ini adalah hasil panen yang diukur secara kuantitas dibandingkan dengan bahan atau usaha untuk mencapai kuantitas hasil panen tersebut yang dapat diukur secara dari segi kualitas maupun kuantitas.

Hal yang berpengaruh penting terhadap proses produksi yang kemudian berdampak pada hasil produksi adalah sumberdaya yang termasuk dalam faktor produksi (input). Secara artian faktor produksi adalah segala hal atau unsur yang ada, baik itu di alam dan atau di masyarakat dan unsur tersebut mampu digunakan pada proses

²⁸ Djoko Sumarjono, *Diktat Ilmu Ekonomi Produksi*, (Semarang: UNDIP, 2004), hal. 16

produksi untuk menambah kegunaan/manfaat atau menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya bisa maksimal apabila dijalankan dengan metode atau alternatif yang tepat serta memiliki pengetahuan yang cukup mengenai alokasi atau pengolahan sumberdaya tersebut. Maka secara bersamaan kegiatan produksi/proses produksi bisa dilakukan. Hingga pada akhirnya hasil dari kegiatan produksi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat/ sebagai konsumen untuk mendapatkan keuntungan/laba bagi pelaku usaha.²⁹ Terdapat empat cara untuk meningkatkan produktivitas, yaitu:

- 1) Menerapkan program reduksi biaya, artinya dalam menghasilkan output dan kuantitas yang sama akan menggunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Jadi peningkatan produktivitas melalui program reduksi biaya berarti output yang tetap dibagi dengan input yang lebih sedikit.
- 2) Mengelola pertumbuhan, artinya meningkatkan output dalam kualitas yang lebih tinggi melalui peningkatan penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Artinya output meningkat sedangkan input menurun.
- 3) Bekerja lebih tangkas, bila tenaga kerja sebagai salah satu unsur input bisa bekerja dengan optimal maka akan dapat

²⁹ Karmini, *Ekonomi Produksi Pertanian*, (Samarinda: Mulawarman University PRESS, 2018), hal. 3

meningkatkan produktivitas. Jadi produktivitas meningkat tetapi jumlah input tetap. Sehingga juga akan diperoleh biaya produksi perunit akan ikut rendah.

4) Mengurangi aktivitas

Melaui pengurangan sedikit output dan menguramgi banyak input yang tidak perlu akan mampu meningkatkan produktivitas

5) Bekerja lebih efektif, artinya dalam melaksanakan proses alokasi input, harus dilakukan seefektif mungkin. Dengan cara ini dapat meningkatkan hasil output (produktivitas).³⁰

b. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja

Mengenai pengertian tenaga kerja pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003, yang menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang/individu yang mampu melakukan pekerjaan sehigga mampu menghasilkan barang dan atau jasa baik itu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ataupun untuk kebutuhan masyarakat lainnya.³¹ Pada istilah yang sama yaitu tentang pekerja atau buruh dijelaskan bahwa Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³² Sedangkan menurut literatur lain menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari

³⁰ *Ibid*, hal 4

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bab I, Pasal 2

³² *Ibid*, Bab I, Pasal 3

pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah, dan mengurus rumah tangga.³³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang/individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya atau masyarakat dengan menerima upah/imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja merupakan faktor yang utama yang mendasari atau menentukan terhadap maju atau mundurnya suatu usaha/perusahaan karena tujuan perusahaan dan upaya untuk mencapainya ditentukan oleh kemauan dan kemampuan manusianya. Sehingga menjadi hal penting untuk menempatkan manusia dalam hal ini adalah tenaga kerja yang benar-benar mahir/profesional dibidangnya.³⁴

Sedangkan dalam usaha perikanan pelaku usaha perikanan disebut dengan rumah tangga perikanan (RTP). Dalam prakteknya banyak pelaku usaha perikanan yang menjalankan usahanya secara bersama-sama dalam satu kelompok, dimana kelompok usaha ini disebut dengan kelompok usaha bersama (KUB) yang dalam satu kelompok terdiri dari beberapa orang yang sepakat untuk menjalankan usaha secara bersama.

³³ Sendjun H Munululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 1998), hal. 3

³⁴ Devie Oktarini, *Analisis Jumlah Tenaga Kerja Pada Departemen Field Produksi Dalam Mempengaruhi Produktivitas Perusahaan (Studi Kasus di JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, 2016)*, Jurnal Intergrasi No. 2 Vol. I, hal. 25

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja dilakukan supaya jumlah tenaga kerja dapat efektif sesuai dengan beban pekerjaan, menghindari terjadinya kekosongan posisi kerja, dan semua pekerjaan dapat dilaksanakan. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja perlu dilakukan agar keberlangsungan usaha dapat terjamin baik dimasa kini maupun masa mendatang.³⁵ Perencanaan terhadap kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada informasi internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal yang dimaksud diantaranya adalah :

1) Jumlah Produksi

Jumlah produk yang dihasilkan suatu usaha menentukan jumlah karyawan atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin banyak pula tenagakerja/karyawan yang dibutuhkan.

2) Perluasan Usaha

Perencanaan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh adanya perluasan usaha. Jika perusahaan mengalami perluasan, maka perusahaan juga membutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja (rekrut).

3) Perkembangan Teknologi

Adanya perkembangan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses usaha mempengaruhi tenaga kerja yang

³⁵ Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 4

dibutuhkan. Semakin berkembangnya teknologi membutuhkan sumberdaya manusia (tenagakerja) yang mampu menguasai teknologi tersebut.³⁶

c. Inovasi Usaha

1) Pengertian Inovasi

Greg Richards dan Julie Wilson dalam tulisannya menyebutkan inovasi merupakan penemuan-penemuan baru atau menyebarkan makna penemuan baru tersebut pada masyarakat agar penemuan tersebut bisa ikut ditiru di masyarakat. Secara bahasa kata inovasi atau dalam bahasa Inggris *innovation* berasal dari bahasa Latin yaitu *innovatio* yang memiliki arti *renewal* atau *renovation*, yang mempunyai dasar pada *novus* (*new*) atau baru. Inovasi merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang ada pada perusahaan, bukan hanya tanggung jawab pimpinan perusahaan saja. Inovasi dinilai sebagai kreasi hal baru dan penerapannya. Inovasi mempunyai makna pengembangan dan pengaplikasian suatu hal baru.³⁷

Inovasi juga dimaknai sebagai suatu proses dan atau hasil dari pengembangan dan atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan (termasuk keterampilan

³⁶ Sudaryono, *Pengantar Bisnis: Teori dan Contoh Kasus*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hal. 129

³⁷ Greg Richards dan Julie Wilson sebagaimana dikutip Poerwanto, dkk, *Inovasi Produk dan Motif Seni Batik Pesisiran Sebagai Basis Pengembangan Industri Kreatif dan Kampung Wisata Minat Khusus*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 4, 2012, hal. 219

teknologi) dan pengalamannya untuk menciptakan atau memperbaiki produk baik berupa barang dan atau jasa melalui proses dan atau cara yang belum pernah ada (baru), yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan terutama bagi ekonomi dan sosial.³⁸

2) Jenis Inovasi

Disebutkan pada studi literatur, Schumpeter (1934), bahwa perusahaan dapat melakukan setidaknya lima kemungkinan jenis/macam inovasi, yaitu :

- a) Mengenalkan produk baru berupa perubahan kualitatif dari produk sebelumnya
- b) Proses inovasi baru bagi industri
- c) Pembukaan (jangkauan) terhadap pasar baru
- d) Mengembangkan berbagai sumber pasokan bahan baku, serta
- e) Reformasi terhadap organisasi

Sedangkan menurut sumbernya, terdapat beberapa klasifikasi inovasi yaitu: inovasi yang di mulai saat terbentuknya organisasi (*emergent*), inovasi yang di adopsi dari luar perusahaan/perusahaan lain (*imported*), dan

³⁸ Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 219

inovasi yang di dirong berasal dari luar organisasi (*imposed*).³⁹

3) Indikator Inovasi

Inovasi dilakukan perusahaan dalam bentuk menerapkan sistem atau mekanisme baru dalam rangka melakukan adaptasi dengan lingkungan yang senantiasa dinamis. Dengan demikian perusahaan selalu dituntut untuk mampu menciptakan dan memunculkan berbagai pemikiran baru, gagasan baru dengan menawarkan produk yang inovatif selain itu juga dibarengi meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan tujuan untuk memberi kepuasan terhadap pelanggan.⁴⁰

Adapun yang termasuk dalam indikator inovasi pada penelitian ini yang digunakan peneliti untuk menganali inovasi usaha pada kelompok pembudidaya ikan “Mina Makmur” adalah sebagai berikut:

a) Kualitas produk (ikan)

Apabila kualitas suatu produk baik, tentu kepuasan pelanggan juga akan meningkat, produk mudah terjual, memudahkan persaingan dengan produk

³⁹ Rita Indah M dan Irma T, *Orientasi Kewirausahaan, Inovasi dan Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada UKM Sentra Kabupaten Malang)*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Vol. 10, No. 1, 2014, hal. 25

⁴⁰ Ratna Kusumawati, *Pengaruh karakteristik Pimpinan dan Inovasi Produk Baru Terhadap Kinerja Perusahaan Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Berkelanjutan*, AKSES, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 5, No. 9, April 2020, hal. 55

pesaing, semakin mengembangkan pangsa pasar dan volume penjualan, serta memungkinkan mampu menjual produk dengan harga yang lebih tinggi.

b) Terciptanya variasi usaha baru

Apabila suatu perusahaan telah berkembang, maka akan mungkin terciptanya model atau bentuk usaha baru yang berasal atau sejenis dengan usaha sebelumnya. Dengan terciptanya model atau bentuk usaha baru tersebut akan meningkatkan penawaran kepada pelanggan atau konsumen.

c) Reformasi Organisasi

Apabila suatu perusahaan terus dan telah berkembang maka seiring dengan itu juga diperlukan pengorganisian yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Semakin berkembang suatu usaha juga harus semakin efektif pula pengorganisasian yang harus dibuat karena akan semakin detail dan banyak pula unit-unit atau pembagian tugas pada perusahaan tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar perkembangan dan potensi usaha yang ada dapat berjalan optimal.

d. Peningkatan Pendapatan Omzet

1) Pengertian Pendapatan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).⁴¹ Sedangkan dalam kamus manajemen pendapatan mempunyai arti uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi berbentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.⁴² Berdasarkan pengertian diatas apabila dihubungkan pada konteks penelitian ini pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan berupa uang atau laba yang di dapat dari hasil usaha kelompok budidaya ikan Mina Makmur.

2) Karakteristik Pendapatan

- a) Bahwa pendapatan akan tercipta dari berbagai kegiatan pokok perusahaan untuk mencari keuntungan (laba)
- b) Bahwa pendapatan bersifat berulang-ulang atas kesinambungan dari berbagai kegiatan pokok tersebut yang dikendalikan oleh manajemen.⁴³

3) Jenis-Jenis Pendapatan

- a) Pendapatan atau penghasilan yang berasal dari usaha utama perusahaan
- b) Pendapatan atau penghasilan yang berasal dari luar usaha utama perusahaan (usaha sampingan).⁴⁴

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185

⁴² BN Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

⁴³ Hery dan Widyawati Lekok, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 24

⁴⁴ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 46

4) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

a) Produk

Dalam hal ini manajemen penjualan memiliki peran penting, yaitu kaitannya dengan desain produk. Manajemen penjualan harus selalu memberikan saran guna memperbaiki dan meningkatkan desain produk untuk selalu memuaskan konsumen dan mengikuti perkembangan jaman.

b) Harga

Harga adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pembeli untuk memperoleh suatu produk/barang. harga yang ditawarkan harus sepadan dengan kualitas produk yang ada, demi menghindari keluhan pelanggan terhadap harga yang ditawarkan

c) Distribusi

Distribusi merupakan upaya penyaluran barang dari produsen ke konsumen, untuk semakin memperluas jangkauan konsumen dan produk. Semakin luas jangkauan distribusinya tentu akan semakin pula promosi dan pendapatannya

d) Promosi

Promosi adalah aktifitas untuk memberikan informasi atau berita kepada konsumen mengenai

produk perusahaan, tujuannya adalah mempengaruhi dan mengingatkan konsumen supaya memilih produk perusahaan.⁴⁵

5) Pengertian Omzet

Omzet merupakan jumlah uang hasil penjualan hasil produksi/barang (dagangan) tertentu pada periode tertentu.⁴⁶

Chaniago memberikan pendapat yaitu omzet adalah seluruh jumlah pendapatan dari hasil penjualan suatu barang/jasa pada kurun tertentu. Berdasarkan pengertian diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa omzet ialah seluruh jumlah pendapatan yang berupa uang atas hasil penjualan suatu produk baik berupa barang atau jasa dalam waktu tertentu selama masa penjualan.⁴⁷

Dari pengertian diatas apabila dihubungkan dengan omzet pada usaha budi daya perikanan berarti seluruh jumlah uang hasil penjualan produk usaha yang dimiliki pada periode atau kurun waktu tertentu yang diukur secara kuantitatif (Rupiah).

Pelaku usaha dituntut terus berupaya agar omzet usahanya selalu meningkat, dari hari kehari, minggu keminggu, bulan kebulan hingga tahun ketahun.

⁴⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Penerbit Salemba Empat, 2010), hal. 127

⁴⁶ Nisa Nurfitriana dan Retno Hidayat, *Jurnal Omzet Penjualan Berdasarkan Jenis Hajatan dan Waktu*, Vol. 10, No. 6, 2015, hal. 4

⁴⁷ M. Irawan Trias Saputra, et.al, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 38, No. 1, 2016

Peningkatan ini tentu memerlukan berbagai strategi dari pengusaha yang mana peningkatan omzet ini diharapkan akan menjamin keberlangsungan usaha sehingga usaha bisa terus mengalami perkembangan.

C. Budi Daya Perikanan

1. Pengertian Budi daya

Budi daya perikanan merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada disekitar untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Budi daya merupakan bentuk campur tangan manusia dalam meningkatkan produktivitas perairan.⁴⁸

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 pembudidayaan ikan adalah “Kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.⁴⁹ Dari beberapa pengertian diatas menitikberatkan pada bagaimana upaya manusia untuk mengolah dan meningkatkan produktivitas perairan dalam bentuk budidaya perikanan khususnya air tawar yang berorientasi pada upaya mencari keuntungan, melalui produk yang bisa dihasilkan. Dalam hal ini adalah kelompok

⁴⁸ Cahyo Suparinto, *Panduan Lengkap Gurami*, (Jakarta: Swadaya, 2008),hal. 3

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bab VIIA, Pasal 1, Ayat 13

pembudidaya “Mina Makmur” yang beralamat di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

2. Pengertian Perikanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 disebutkan mengenai pengertian perikanan yaitu “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.”⁵⁰ Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia perikanan mempunyai arti perihal yang menyangkut penangkapan, pemiharaan, dan pembudidayaan ikan.⁵¹ Tujuan utama dari pengelolaan perikanan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menciptakan produktivitas sumberdaya hayati secara kontinu atau berkelanjutan.⁵²

Dari beberapa pengertian diatas mengenai perikanan dapat disimpulkan bahwa perikanan adalah segala aktivitas untuk mengelola sumberdaya ikan mulai dari proses praproduks ihingga pascaproduksi yang dilakukan atas dasar bisnis perikanan agar tercapai kesejahteraan dan produktivitas sumberdaya hayati yang berkelanjutan.

⁵⁰ *Ibid.* Ayat 20

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 541

⁵² Edwarsyah, et.al, *Pengantar Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekologis/EAFM: Teori dan Praktik*, (Surabaya: Brilliant, 2017), hal. 1

D. Penelitian Terdahulu

1. Oleh Damri Kustiawan Nazaki.⁵³ dengan penelitiannya yang berjudul Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa Berangkait Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan kurang efektif dalam memberikan perannya yang berupa bantuan, karena tidak meratanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan dalam artian banyak masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari dinas ini, serta kurangnya pengawasan dari dinas setelah disalurkan bantuan kepada masyarakat yang menerimanya, sehingga banyak dari bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan tidak dipergunakan atau dikelola sebagaimana mestinya, terdapat barang bantuan yang dijual kembali oleh penerima bantuan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dalam memberdayakan kelompok usaha perikanan. Dalam hal ini adalah kelompok pembudidaya “Mina Makmur” Tulungagung. Seperti penelitian Damri Kustiawan Nazaki pada masyarakat nelayan di Desa Berangkait Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

Sedangkan perbedaan di penelitian yang dilakukan Damri Kustiawan Nazaki adalah mengenai objek penelitiannya yang dilakukan

⁵³ Damri Kustiawan Nazaki, *Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Desa Berangkait Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun 2014*, Skripsi

pada masyarakat nelayan dan indikator pada penelitiannya yang diambil konsep Poerwadarminta yaitu terdiri dari Faktor pengetahuan, sumberdaya manusia, hal yang mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan suatu program. Sedangkan di penelitian ini objek penelitian dilakukan pada kelompok pembudidaya ikan air tawar dan indikator yang digunakan adalah produktivitas, peningkatan jumlah tenaga kerja, inovasi usaha dan peniangkatan pendapatan usaha.

2. Oleh Hendra Alex Makakombo.⁵⁴ tentang Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pengelolaan Hasil Laut (Studi Tentang Pengelolaan Ikan Roa di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tegulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa belum efektifnya peran yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengelolaan hasil laut berupa ikan roa di Kelurahan Bahoi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan hingga pemasaran hasil laut, pengalokasian program-program dan bantuan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan dari Dinas terkait sehingga belum digunakannya fasilitas tempat pengelolaan dan pemasaran ikan roa oleh masyarakat.

Persamaan penelitian yang dilakukan Hendra Alex Makakombo ini adalah membahas mengenai bentuk peran yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat terhadap usaha pengelolaan ikan di

⁵⁴ Hendra Alek Makakombo, *Peranan Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pengelolaan Hasil Laut (Studi Tentang Pengelolaan Ikan Roa di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tegulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)*, Skripsi

Kelurahan Bahoi, Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Berupa program bantuan dan pelatihan kepada nelayan setempat, agar dalam mengelola dan pemanfaatan hasil perikanan dapat dilakukan secara maksimal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Hendra Alex Makakombo ini adalah mengenai fokus penelitiannya yang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan terhadap hasil laut berupa ikan roa dan bagaimanaperan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dalam upaya membantu nelayan memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mempunyai fokus yang lebih luas selain upaya memaksimalkan hasil perikanan juga membahas mengenai lingkup bagaimana perkembangan usahanya.

3. Oleh Merlian Yulistriani.⁵⁵ dengan penelitiannya yang mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap-Indramayu), Tahun 2013.

Dari hasil penelitaian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan upaya meningkatkan pendapatan, pendidikan dan Kesehatan masyarakat nelayan.

Persamaan dengan penilitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, membahas peran lembaga Pemerintahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan upaya dari

⁵⁵ Merlin Yulistriani, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat nelayan (Studi di Desa Dadap, Indramayu)*, Skripsi

pelaku usaha tersebut dalam mengolah dan memanfaatkan berbagai peran yang diberikan oleh lembaga pemerintah.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai objek penelitian, cakupan fokus penelitian serta tidak adanya indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan yang dimaksud. Objek Penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada kelompok pembudidaya ikan air tawar, sedangkan penelitian Merlian Yulistriani pada masyarakat nelayan. Begitupula mengenai cakupan fokus penelitian yang membahas bagaimana perkembangan usaha kelompok perikanan, sedangkan penelitian Merlian Yulistriani membahas bagaimana kesejahteraan masyarakat nelayan. Selain itu Melian Yulistiani tidak menentukan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan indikator perkembangan usaha yaitu produktivitas, peningkatan jumlah tenaga kerja, inovasi usaha, dan peningkatan pendapatan usaha.

4. Oleh Ratnawati.⁵⁶ dengan penelitiannya mengenai Strategi Dinas Perikanan dan kelautan dalam pengembangan usaha budidaya tambak udang di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari penelitian tersebut dapat dihasilkan kesimpulan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah “Growth-oriented strategy” yaitu memanfaatkan kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Strategi yang dapat

⁵⁶ Ratnawati, *Strategi Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pengembangan Usaha Budidaya Tambak Udang di Kabupaten Kota Waringin Barat*, Thesis

dilakukan untuk pengembangan usaha adalah : a) memanfaatkan sumberdaya alam yang ada yang potensial untuk pengembangan usaha, b) meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program alih usaha illegal logging keusaha sektor perikanan budidaya udang, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai peran atau upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pelaku usaha di bidang perikanan dan dampaknya terhadap perkembangan usahanya.

Sedangkan perbedaannya ada pada objek penelitiannya, pada peneliatian yang dilakukan di pelaku usaha perikanan yang bergerak di sektor budidaya tambak udang dengan populasi penelitiannya pada beberapa individu pelaku budidaya. Lalu pada penelitian saya pada kelompok budidaya ikan air tawar dan fokus pada satu kelompok usaha atas nama usaha bersama. Selain itu cakupan untuk menganalisis perkembangan usaha yang lebih luas yang juga mencakup mengenai inovasi usaha yang mampu dilakukan.

5. Oleh Sierfi Rahayu.⁵⁷ dengan penelitiannya mengenai Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

⁵⁷ Sierfi Rahayu, *Strategi Dinas Perikanan Dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak*, Skripsi

Pada penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa Dinas Perikanan belum berperan optimal dalam upayanya untuk mengembangkan potensi perikanan yang ada di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Labak. Dengan strategi yang dilakukan yaitu pendampingan pada kelompok nelayan, pemeliharaan dan rehabilitasi tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengembangan prasarana perikanan tangkap.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisa mengenai peran Lembaga Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perikanan untuk mengoptimalkan potensi pelaku bisnis perikanan, dengan metode penelitian yang kualitatif deskriptif dengan sumber data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian. Objek penelitian pada kelompok nelayan dengan komoditas perikanan laut atau perikanan tangkap, sedangkan penelitian ini pada kelompok usaha ikan air tawar dengan metode budidaya. Lingkup penelitian juga lebih sempit, karena lebih berfokus pada pengoptimalan tempat pelelangan ikan (TPI) yang notabene TPI merupakan proses akhir dari usaha perikanan (pasca produksi). Sedangkan penelitian ini meliputi proses dari praproduksi hingga pascaproduksi dengan orientasi pada upaya mengoptimalkan usaha atau bisnis perikanannya untuk mencapai usaha yang terus berkembang.